

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten Sidoarjo selama 3 (tiga) bulan. Hasil data yang diperoleh kami mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Operasional Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di UPUBKB Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Ada beberapa prosedur pengujian yang dilakukan tidak dilaksanakan secara maksimal seperti pada penggunaan alat uji tidak dioperasionalkan sepenuhnya karena kurangnya sumber daya penguji yang bertanggungjawab pada setiap alat uji dan adanya program daerah.
2. UPUBKB Kabupaten Sidoarjo mempunyai standar penggunaan APD, namun pada pelaksanaannya beberapa penguji belum menggunakan APD yang sesuai standar. Ketersediaan rambu terkait SMK3 juga kurang dan tidak tersedianya jalur evakuasi.
3. Berdasarkan perhitungan beban kerja di UPUBKB Kabupaten Sidoarjo bahwa Sumber Daya Manusia (Penguji) terdapat ketidaksesuaian sehingga mengakibatkan beban kerja yang berlebih dan waktu pengujian kurang efektif.

V.2. Saran

Berdasarkan evaluasi selama magang 2, untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPUBKB Sidoarjo kami menyarankan:

1. Pendaftaran online untuk pengujian kendaraan bermotor sebaiknya segera direalisasikan kembali untuk mengurangi antrian pendaftaran.
2. Perlunya penambahan papan informasi di loket pendaftaran tentang alur pengujian dan syarat-syarat yang harus dilengkapi sebelum melakukan pengujian kendaraan bermotor.
3. Perlunya penambahan sumber daya manusia tenaga penguji di lapangan untuk pemeriksaan teknis dan laik jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Peraturan
Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Menteri Perhubungan No.19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
- KP.1954/AJ 502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala
Kendaraan Bermotor
- KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Penyelenggaraan Ketenagakerjaan No.3
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Peraturan Bupati Bojonegoro No.9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi,
Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Bupati Bojonegoro No.10 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor
- Budiharjo, A., qbal, M. dan Mauliyda, M.A. (2021) „Analisis Bahaya Dan Resiko Pada
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor“, Jurnal Kesehatan, 12(1),
p. 011. doi:10.35730/jk.v12i1.661.